

**PENDEKATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
OLEH PERGURUAN TINGGI¹⁾**

Sjafri Mangkuprawira²⁾

MENGAPA MISKIN ?

Pada tahun 1970 ada sebanyak 60 orang penduduk Indonesia miskin dari setiap 100 orang penduduk atau sekitar 70 juta orang. Dengan adanya pembangunan selama orde baru maka pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang. Namun, secara absolut angkanya masih cukup besar yaitu sekitar 27 juta orang. Sebagian besar hidup di daerah pedesaan termasuk di daerah-daerah terpencil dan di daerah kumuh perkotaan.

Kemiskinan
Kemiskinan sering disebut pula ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok baik materi maupun bukan materi: Materi dapat berupa pangan, pakaian, kesehatan dan papan. Sedang bukan materi berbentuk kemerdekaan, kebebasan hak asasi, kasih sayang, solidaritas, sikap hidup pesimistik, rasa syukur dan sebagainya.

Masalah kemiskinan identik dengan keterbatasan dalam pemilihan dan penguasaan sumberdaya fisik dan non fisik. Akibat kemiskinan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat konsumsi pangan-gizi, produktivitas kerja rendah, tingginya angka kematian bayi, anak dan ibu hamil, rendahnya usia hidup dan pendidikan yang rendah. Dengan perkataan lain kemiskinan dicirikan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat berbentuk kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural (6). Kemiskinan alamiah tumbuh karena rendahnya jumlah dan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Akibatnya peluang produksi atau usaha menjadi relatif kecil. Kemudian timbulah kasus-kasus pengangguran, urbanisasi, kriminalitas, dan sebagainya. Sedangkan kemiskinan struktural timbul secara langsung/tidak langsung disebabkan oleh sistem nilai seperti ketimpangan ekonomi, pemusatan kekayaan pada segolongan kecil, dan ketidakadilan sosial. Bersamaan dengan itu

-
- 1) Disampaikan pada Lokakarya Pengalaman Empirik Institut Pertanian Bogor dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, LPM IPB, 10 Juli 1993
 - 2) Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Program Pascasarjana IPB dan Ketua LPM IPB

kemiskinan dapat pula karena adanya budaya miskin yaitu berbentuk kemalasan, fatalistik, cepat menyerah dan sangat pesimistik terhadap kehidupan. Dengan perkataan lain kemiskinan timbul dibuat oleh dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa kategori manusia yang miskin apakah miskin materi maupun bukan materi. Adakalanya seseorang berkecukupan bahkan berlebihan dalam hal materi tetapi miskin dalam hal bukan materi, seperti ketidakpedulian sosial, dholim, rakus, hidup gelisah, keluarga tidak harmonis, dan sebagainya. Sebaliknya ada yang miskin materi tetapi kaya dengan bukan materi seperti ketegaran hidup, kasih sayang, ridha, solidaritas sosial, dan sebagainya. Yang paling parah adalah jika miskin dalam hal materi dan bukan materi. Sebaliknya yang paling ideal adalah mereka yang kaya materi sekaligus pula kaya bukan materi seperti keluarga harmonis, solidaritas sosial yang tinggi, rasa bersyukur yang tinggi dan sebagainya.

Masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ketiga masalah tersebut saling mengait yang muncul dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, modal, kelembagaan, akses prasarana-sarana transportasi/komunikasi, dan lapangan kerja.

Kemiskinan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dicirikan oleh orang yang tidak punya harta milik, pendidikan yang rendah, kesehatan yang kurang, tidak punya pengaruh kekuasaan, dan sebagainya. Fenomena tersebut merupakan suatu sindrome yaitu jalinan fenomena yang relatif sulit diberantas khususnya di daerah pedesaan.

Keterbelakangan masyarakat yang diungkapkan dalam bentuk kemampuan berpartisipasi sebenarnya tidak luput pula berkaitan dengan kemiskinan dan kebodohan. Keterbelakangan masyarakat yang terjadi di daerah pedesaan misalnya, diasumsikan karena teknologi yang digunakan masih primitif. Karena itulah beberapa kebijakan modernisasi telah diterapkan. Namun sudahkah sepenuhnya masyarakat terjangkau? Jika sudah terjangkau pada golongan yang mana? Apakah ada dampaknya terhadap kemiskinan?

Kelompok masyarakat miskin dan keterbelakangan pada dasarnya dapat dicirikan oleh rendahnya kebutuhan gizi minimal per kapita, pemilikan lahan yang sempit, pendapatan per kapita yang rendah, kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin, serta partisipasi rakyat yang minim di dalam pembangunan. Beberapa faktor penyebab antara lain adalah kurangnya modal bagi pengembangan usaha dan sumberdaya

alam, kurangnya pengembangan usaha, langkanya lapangan kerja serta struktur masyarakat yang menghambat. Walaupun pembangunan nasional sudah dilakukan Pelita demi Pelita namun masalah-masalah tersebut belum sepenuhnya terpecahkan.

Munculnya kemiskinan itu sendiri dapat bermula dari pemilikan aset atau modal bagi usaha untuk membangun diri dan keluarga. Di daerah pedesaan aset-modal ini dicirikan oleh lahan usaha yang sempit akibat dari sistem warisan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Rendahnya modal yang berakibat pendapatannya yang makin rendah menyebabkan berkurangnya kesempatan anggota keluarga dalam meningkatkan kemampuan pendidikan, keahlian dan ketrampilannya. Rendahnya kemampuan dalam berbagai perspektif tersebut dari tiap keluarga mencerminkan seberapa jauh kemampuan masyarakat dalam membangun desanya.

Keterbelakangan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dicirikan oleh penguasaan modal dan pengetahuan yang rendah. Sedangkan pengetahuan yang rendah mencerminkan adanya masalah kebodohan akibat kekurangan maupun dalam mendapatkan pendidikan latihan, ketrampilan dan informasi yang antara lain disebabkan karena kemiskinannya. Selain itu dapat disebabkan karena struktur sosial yang tidak mendukung kelompok ini berpartisipasi misalnya karena hubungan kerja sifatnya eksploitatif. Kondisi demikian tercermin antara lain dalam kemampuan menganalisis situasi yang rendah, kurang mengajukan gagasan-gagasan pembangunan, kedudukan atau posisi yang rendah dalam pengambilan keputusan. Dengan ungkapan lain, keterbelakangan telah menjadi penghambat utama untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk maju.

TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan mendasar adalah tanggung jawab siapakah jika ada fenomena kemiskinan ? Permasalahan kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial walaupun yang menderita kemiskinan adalah perorangan. Mereka mau tidak mau miskin karena timbul dari proses produk sosial. Dengan demikian, pemecahannya tidak tepat diserahkan sepenuhnya kepada "alam" tetapi harus melalui proses perubahan teknologi, sikap masyarakat dan sumberdaya manusia dengan mekanisme yang terprogram dan terencana dengan baik.

Manusia disamping sebagai perorangan juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat. Artinya kita jangan terjebak ke dalam pemikiran bahwa tiap individu bebas satu sama lainnya dan saling tidak peduli. Di sini ditekankan bahwa

kemiskinan perlu dipandang dari sudut dimensi sosial ketimbang hanya sebagai kasus perorangan.

Sebagai konsekuensi logis dari hal di atas maka penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya semata-mata didasarkan pada kebaikan hati seseorang saja. Tetapi seyogyanya lebih didasarkan pada panggilan moral kewajiban sosial dan dilakukan oleh masyarakat keseluruhan. Masyarakat di sini diartikan sebagai suatu kesatuan dengan batas-batasnya apakah secara universal atautkah pada lingkungan yang lebih sempit dan khusus.

Sebagai rangkuman dari uraian di atas maka mengatasi kemiskinan memiliki arti diperlukannya penanaman nilai-nilai moral yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat termasuk perguruan tinggi mengingat penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah tanggung jawab masyarakat.

Program mengatasi kemiskinan tentunya tidak semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat keseluruhan. Alasannya adalah bahwa dalam konteks masyarakat, kemiskinan yang meluas bukan hanya tidak dapat diterima secara moral, tetapi juga dengan sendirinya akan menurunkan kapasitas sosial-ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.

Apabila fenonema masalah pokok di atas terjadi maka perguruan tinggi dihadapkan pada pertanyaan : apa yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk ikut membantu memecahkan masalah tersebut. Karena statusnya maka keterlibatan perguruan tinggi agaknya dapat dilakukan dengan pendekatan intervensi pendidikan dan peningkatan pendapatan dari kelompok-kelompok strategis tertentu.

DIPERLUKAN METODA CERMAT

Permasalahan kemiskinan selain mencakup aspek positif (what is) juga sarat akan dimensi nilai (7). Siapa yang digolongkan miskin sebagian ditentukan oleh bagaimana kemiskinan didefinisikan. Karakteristik/profil kemiskinan sekilas tampaknya merupakan persoalan analisis positif atau rasional. Tetapi dalam prakteknya ia sarat akan nilai. Artinya karakteristik dari kelompok yang tergolong miskin akan tergantung dari standar variabel atau standar absolut yang digunakan. Dengan kata lain analisis tentang karakteristik kemiskinan tidak hanya tergantung pada dimana garis kemiskinan diletakkan tetapi juga tergantung dari bagaimana kita mengukurnya. Jadi bukan semata-mata masalah teknis

saja tetapi juga bersifat politis dan tergantung pada nilai yang berlaku pada sistem sosial masyarakat tert

Secara metodologis sering kita dibuat bingung analisis fenomena kemiskinan. Misalnya kemiskinan berhubungan erat dengan produktivitas. Ada kalangan berpendapat bahwa produktivitas seseorang rendah karena memang ia miskin. Tetapi pihak lain berpendapat sebaliknya. Tampak bahwa proposisi sebab-akibat dari fenomena tersebut tergantung dari nilai yang dianut oleh nilai dari seseorang. Namun demikian fenomena tersebut tetap dipandang sebagai suatu masalah nyata dan bukan bersifat abstrak. Implikasinya apabila berbicara tentang kemiskinan sebagai suatu masalah nyata maka apabila ditunda pengentasannya maka akan banyak berakibat fatal. Di sinilah kalangan akademisi/ilmuwan perguruan tinggi/lembaga-lembaga penelitian di Indonesia dengan karakteristiknya yang peduli pada lingkungan, menelaah masalah kemiskinan tidak saja dikaitkan dengan telaahan ilmu pengetahuan positif dan normatif tetapi juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk mencari resep yang tepat dalam pengentasan kemiskinan (7).

Dalam konteks dengan nilai, misalnya, kita harus memiliki pengetahuan tentang perilaku sosial-ekonomi, tatanan nilai dari suatu masyarakat-masyarakat miskin dimana kita akan berupaya untuk memperbaikinya.

Langkah-langkah dalam pengentasan kemiskinan adalah (a) menetapkan apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan apa saja kriteria dan indikator-indikatornya; (b) menetapkan siapa yang disebut golongan miskin menurut standar yang disepakati; (c) memahami apa yang terjadi di balik fenomena kemiskinan tersebut atas dasar pendekatan teori/disiplin ilmu dan pengalaman; (d) mengidentifikasi permasalahan yang mendasar, bukan mengidentifikasi gejala yang tampak di permukaan; (e) merumuskan berbagai alternatif program dan strategi serta menilai kelemahan dan keunggulannya dilanjutkan dengan menentukan pilihan yang terbaik (layak, dapat dipraktekan, dapat dikelola); (f) menyusun rencana operasional; (g) melaksanakan dan mengendalikan program; (h) menentukan dan menilai; dan (i) melakukan umpan balik. Secara keseluruhan maka diperlukan suatu intervensi program.

Intervensi pengentasan kemiskinan dapat dalam bentuk intervensi psikologis-sosial (perangkat lunak) dan intervensi perangkat keras (1). Intervensi lunak dapat berbentuk pendidikan (formal, non formal, informal) dan penerangan yang bertujuan mendorong khalayak sasaran untuk (a) beretos kerja keras, semangat hidup, dan mandiri; (b) untuk mampu mengembangkan cara-cara hidup sosial-ekonomi yang efektif dan efisien (perilaku produksi, konsumsi dan distribusi); dan (c) untuk lebih meningkatkan harkat kemanusiaannya (hak-

kewajiban) dalam kehidupan yang kompleks ini. Ciri dari intervensi ini adalah suatu program yang tidak langsung berpengaruh pada pengurangan derajat kemiskinan sedangkan intervensi perangkat keras memiliki ciri langsung dan tidak langsung.

Contoh intervensi perangkat keras adalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan memperoleh pangan dan keterjaminan pangan; seperti penyediaan kredit, benih, pupuk, prasarana dan sarana ekonomi dan sebagainya.

Sementara itu kita perlu menentukan siapa khalayak sasarannya. Di sektor pertanian (8), karakteristik pokok golongan miskin dapat berupa (a) buruh tani dan petani berlahan sangat sempit; (b) petani yang bertempat tinggal di daerah miskin sumberdaya dan akses yang sulit; (c) tidak terjangkau irigasi teknis; dan (d) lapangan kerja non pertanian hampir tidak ada; (e) tingkat pendidikan dan ketrampilan rendah; (f) peternak gurem; dan (g) nelayan berskala kecil.

ARTI PEMECAHAN MASALAH KEMISKINAN

Pemecahan masalah kemiskinan adalah proses pengambilan keputusan yang mencakup tindakan yang akan datang atau yang diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, paling kurang ada tingkat keputusan yang relatif berbeda yang didasarkan pada luasnya implikasi-implikasi atau lingkup dari pemecahan masalah tersebut. Jenis keputusan yang pertama adalah pemecahan masalah yang relatif bersifat sederhana dan berulang mengenai tindakan rutin yang hampir dibuat setiap hari. Pada keputusan tingkat kedua, pemecahan masalah relatif cenderung lebih kompleks. Dia memiliki jangkauan yang lebih luas dan sudah mulai membutuhkan tingkat nalar atau analisis tertentu yang keputusannya berupa taktik. Tingkat keputusan yang ketiga adalah pemecahan masalah yang memiliki dimensi ruang dan waktu yang sangat luas dan umumnya memerlukan informasi dan kontemplasi yang terbanyak.

Batasan pengertian di atas mengidentifikasi tiga ciri proses pemecahan masalah kemiskinan, yaitu (a) mencakup suatu tindakan yang diharapkan, (b) terdapat variasi tindakan sesuai dengan di tingkat mana pemecahan masalah diputuskan, dan (c) adanya kombinasi pertimbangan mengenai implikasi-implikasi yang kompleks yang diantisipasi dari tindakan yang diharapkan.

Identifikasi tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa masalah kemiskinan adalah sedemikian rupa kompleksnya. Hal demikian dapat ditinjau dari ragam kebutuhan, potensi daerah, sosial budaya dan sebagainya. Sejak manusia berada dalam sistem sosial, sejak itu pulalah proses pemecahan masalah telah timbul. Dalam masyarakat yang masih sederhana/tradisional, proses pemecahan masalah relatif akan sederhana pula. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka cenderung semakin rumitlah proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalahnya.

Apabila berbicara tentang pembangunan masyarakat maka pusat perhatian kita adalah pada masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan. Tantangan pembangunan bukan hanya membangun masyarakat dalam arti seperti di atas, tetapi juga membangun dunia industri dengan segala aspek teknologi, sosial dan ekonominya.

Pembangunan masyarakat dan industri dapat diartikan sebagai proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk dalam menguasai lingkungannya yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Lingkungan sosial ekonomi tersebut berupa kemampuan menganalisis situasi dan masalah, mengembangkan gagasan-gagasan pembangunan, penguasaan teknologi dan modal, keahlian dan ketrampilan serta kepemimpinan yang mendukung pembangunan.

Namun demikian, belum sepenuhnya masyarakat menguasai lingkungan tersebut. Berbagai faktor pembatas seperti keahlian dan ketrampilan serta penguasaan teknologi yang kurang, menyebabkan masih adanya masalah-masalah kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan di kalangan masyarakat. Mereka masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak agar mereka tidak tertinggal dalam mencapai taraf hidup yang layak.

Sesuai dengan kedudukannya, perguruan tinggi di Indonesia dapat berperan dalam proses pemecahan masalah kemiskinan. Dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh perguruan tinggi mereka dapat membantu masyarakat dari tahap analisis situasi masyarakat, melahirkan gagasan-gagasan pembangunan masyarakat, sampai pada mengembangkan berbagai jenis teknologi. Dengan demikian tugas perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan sarjana tetapi juga aktif didalam menunjang dan menggerakkan pembangunan masyarakat.

MODEL PENDEKATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Dalam langkah-langkah pemecahan masalah kemiskinan antara lain telah diungkapkan langkah pemilihan tindakan alternatif. Dengan langkah tersebut ingin dilakukan mana usaha yang dianggap paling efektif dalam mencapai tujuan pemecahan masalah kemiskinan. Namun uraian langkah-langkah tersebut merupakan prinsip-prinsip pokok bagi usaha pemecahan masalah pada umumnya. Tergantung pada status, peranan dan status lembaga yang terlibat dalam pemecahan masalah maka metoda pendekatannya pun diduga akan bervariasi.

Dalam upaya ikut memecahkan masalah kemiskinan maka digunakan pendekatan berwawasan yang berakar pada masyarakat. Karakteristik Indonesia dengan kebhinekaannya menuntut perguruan tinggi untuk sekaligus menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan struktural. Dengan kata lain bahwa pemecahan masalah kemiskinan harus bertumpu pada kemampuan masyarakat dan perguruan tinggi itu sendiri.

Ditinjau dari kepentingan masyarakat maka segala upaya pembangunan masyarakat hendaknya dapat ditumbuhkan menjadi milik masyarakat sehingga kelangsungan hidup proyeknya terjamin. Sedangkan ditinjau dari kedudukan dan peranan perguruan tinggi upaya pendekatan masalahnya dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan kemanusiaan. Pendekatan dari bawah (masyarakat) dan dari atas (struktural) perlu diselenggarakan agar lebih menjamin keberhasilan usaha pemecahan masalah. Perguruan tinggi sebagai agen pembaharu seyogyanya bertindak sebagai jembatan (komunikator) antara dua kepentingan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dipakai sebagai dasar dalam menerapkan pendekatan-pendekatan pemecahan masalah kemiskinan. Berdasarkan masalah, tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat maka beberapa pendekatan pemecahan masalah dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Pendekatan pendidikan dan pelayanan pada masyarakat

Kedua pendekatan pengentasan kemiskinan ini adalah paling hakiki ditinjau dari kedudukan dan peranan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran PPM diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar pada gilirannya mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan pelayanan pada masyarakat diharapkan dapat menunjang pendekatan pendidikan tersebut.

2. Pendekatan yang mengacu pada satuan kawasan ekonomi dan administrasi pembangunan

Sesuai dengan lingkup potensi dan situasi dari lokasi tertentu maka pendekatan kemiskinan dapat berbentuk pendekatan nasional, regional dan lokal. Dengan demikian jenis tindakan alternatif pemecahan masalah oleh perguruan tinggi dapat dalam bentuk pemikiran/gagasan perencanaan di tingkat nasional sampai pada implementasi tindakan di tingkat lokal. Orientasi pengentasan kemiskinan dalam tipe pendekatan ini agaknya lebih tepat berkaitan dengan pola ilmiah pokok perguruan tinggi masing-masing dan kondisi sosial, ekonomi, fisik daerah sasaran.

3. Pendekatan yang mengacu pada aspek sektor pembangunan nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa disiplin ilmu seperti fakultas atau jurusan di perguruan tinggi mempunyai kaitan dengan tugas dan lingkup departemen sektoral tertentu. Di segi lain tampak pula permasalahan yang ada di masyarakat pun dapat berlingkup sektoral dan dapat lintas sektoral. Dengan demikian dalam pemecahan masalah kemiskinan oleh perguruan tinggi dapat digunakan dengan dua cara yaitu pendekatan sektoral dan lintas sektoral. Instansi teknis (pusat dan daerah) bekerja bersama dengan perguruan tinggi.

4. Pendekatan yang mengacu pada disiplin Ilmu

Tergantung pada bobot dan luas lingkup masalah kemiskinan maka pendekatan pemecahan masalahnya dapat dilakukan secara monodisiplin. Namun ada kecenderungan karena masalah kemiskinan begitu kompleksnya maka pendekatan yang dianggap efektif adalah yang bersifat interdisipliner dan multidisipliner.

5. Pendekatan yang mengacu pada khalayak sasaran secara sistemik

Pendekatan ini lebih ditekankan pada usaha menggunakan cara pemecahan masalah berdasarkan masalah, kebutuhan dan kemampuan khalayak sasaran itu sendiri. Tergantung pada tujuan dan luas lingkup masalah kemiskinan maka pendekatan pemecahan masalahnya dapat ditujukan pada individual, kelompok, lembaga dan komunitas. Secara keseluruhannya pendekatan yang dilakukan sebaiknya diterapkan secara sistemik dimana peran dari setiap komponen yang terlibat dalam pemecahan masalah ini sudah ditentukan, begitu pula mekanisme antara komponen-komponen tersebut.

Untuk sampai pada pemilihan metoda pendekatan pemecahan masalah di atas maka beberapa hal perlu diungkapkan sebagai berikut: (a) masih tampak adanya kesenjangan antara kompleksitas ilmu dan teknologi yang diterapkan dengan kemampuan atau daya serap masyarakat, (b) masih adanya kecenderungan masyarakat bertindak lebih sebagai pelaku penerima atau pemakai pasif dibandingkan sebagai pelaku yang mencoba untuk mengembangkan dan bahkan menghasilkan sendiri, (c) masyarakat Indonesia sangat beragam dalam aspek sosio-kultur, dan (d) tingkat layanan pembangunan terhadap masyarakat belum merata. Dengan kata lain pendekatan-pendekatan masalah di atas tidak selalu berdiri sendiri dan dia selalu berkaitan dengan permasalahan yang beragam.

Tidak ada satu pun program/kegiatan pengentasan kemiskinan yang segera menghasilkan peningkatan pendapatan dan bahkan kesejahteraan dalam waktu singkat. Yang terpenting, program tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta terus menerus dikaji-kembangkan.

KEPUSTAKAAN

1. Darwin, K. dan Djoko S. 1991. Masalah Kemiskinan: Beberapa Pokok Persoalan dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.
2. Mangkuprawira, S. 1986. Metoda Analisis Situasi Masyarakat dalam Margono Slamet, Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat. Badan Penerbit UNILA.
3. ----- . 1986. Metoda Pemecahan Masalah Masyarakat dalam Margono Slamet, Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat. Badan Penerbit UNILA.
4. ----- . 1991. Poverty, "Coping Mechanisms and Social Solidarity." Makalah Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia ke IV, Kuala Lumpur, Malaysia.
5. ----- . 1993. Kemiskinan dan Solidaritas Sosial. Makalah pada Pelatihan Sumberdaya Manusia. Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Jakarta.
6. Nasoetion, L.I. 1991. Taksonomi Kemiskinan di Indonesia: Suatu Kajian Eksploratif, dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.
7. Pakpahan, Agus. 1991. Prinsip Dasar, Metodologi dan Upaya Penanggulangannya, dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.
8. Sajogyo, 1991. Menanggulangi Kemiskinan: Beberapa Pokok Persoalan, dalam Prosiding Penanggulangan Kemiskinan: Fakultas Pertanian IPB.